

PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG DENGAN KOTA HAMAMATSU (2014-2015)

Rizki Tegar Sembada

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Email: Tegarlennon@gmail.com

Abstrak - Kota Bandung merupakan kota dengan sejarah *sister city* paling tua di Indonesia, sejak tahun 1960 Kota Bandung sudah melakukan Kerjasama *Sister City* dengan salah satu kota di Negara Jerman, Braunschweig. Sejak itu Kota Bandung semakin memperluas Kerjasama *Sister City* nya dengan kota-kota dari negara lain, Dalam Kepemerintahan Wali kota Bapak Ridwan Kamil Kota Bandung gencar memperluas Kerjasama *Sister City* dengan Kota-kota yang memiliki tingkat kreatifitas, Pariwisata dan tata kelola lingkungan yang tinggi, salah satunya dengan bekerjasama dengan Kota Hamamatsu di Negara Jepang. Dengan melihat keadaan Kota Bandung saat ini yang memiliki permasalahan dalam Bidang Tata Kelola Lingkungan, serta dalam Bidang Pariwisata diharapkan dengan adanya Kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu, Kota Bandung mampu memanfaatkan peluang –peluang yang muncul dari kerjasama tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian tentang Kerjasama *Sister City* ini adalah Metode Eksplanatif dengan sumber data yang digunakan berupa observasi dengan metode wawancara terhadap narasumber, dan melalui Studi Pustaka. Penelitian ini menggunakan kerangka analisa bahwa terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kota Bandung dalam Kerjasama *Sister City* dengan Kota Hamamatsu, serta tantangan yang akan di hadapi dalam mekanisme Kerjasama *Sister City* yang dilakukan oleh kedua kota tersebut.

Kata Kunci – Kerjasama *Sister City*, Kota Bandung, Kota Hamamatsu

I. Pendahuluan

Kota Bandung mempunyai banyak hubungan kerjasama luar negeri. Salah satu bentuk yang dibina oleh Kota Bandung adalah kerja sama Luar Negeri dengan kota lain yang berasal dari negara lain yang memiliki tujuan sama, yaitu ingin saling memberi masukan bagi perkembangan masing-masing pihak. Kerja sama ini dikenal dengan sebutan *Sister City* atau

mitra kota kembar *Sister City* sering juga di sebut *Twining City* atau dalam bahasa Indonesia disebut kota kembar, dimana kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.¹

Sister City bermula pada saat Era Globalisasi membawa pola-pola interaksi dalam hubungan internasional yang berujung pada upaya agar dunia menjadi terintegrasi antar satu dengan yang lainnya, maka munculah Pemerintahan Lokal atau *Local Government*. Kehadiran pemerintah lokal (*Local Government*) merupakan salah satu aktor baru dalam arena internasional di tengah globalisasi saat ini. Ditandai dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah-pemerintah lokal/daerah diberbagai negara didunia dimana satu sama lain saling berhubungan.

Berawal dari hal tersebut maka muncul berbagai jaringan-jaringan *Sister City* diberbagai belahan dunia yang terus meningkat mulai dari kota-kota, provinsi, diberbagai negara-negara maju, negara-negara berkembang, bahkan negara-negara kecil. Pengertian *Sister City* sering dikenal sebagai kerjasama antar Kota yang bersifat luas, dan disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Penggunaan skema *Sister City* lebih sering untuk pembangunan ekonomi antara dua kota yang bekerjasama.

Harus disadari bahwa prinsip kerjasama antar daerah kota, adalah harus didasarkan pada beberapa prinsip yang telah dicantumkan dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu:

Efisiensi, efektivitas (keefektifan), sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

¹List of twin towns and sister cities in Indonesia
[http://List_of_twin_towns_and_sister_cities_in_Indonesia] diakses 8 maret 2016

Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.²

Sementara itu, jika prinsip-prinsip kerjasama khusus yang dilakukan dengan pihak luar negeri, maka ditambahkan dan diatur dengan Peraturan Dalam Negeri No. 3 /2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (pasal 2), sehingga prinsip tersebut tertuang dalam :

persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung pengutamaan gender, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Sehingga prinsip dasar dari skema *Sister City* ini harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini setidaknya 47 pemerintah kota dari 33 provinsi di Indonesia telah melakukan hubungan kemitraan *Sister City*.

Dilihat dari sejarahnya terbentuknya konsep dan skema *Sister City* tersebut di atas, sesungguhnya skema yang diinginkan adalah hubungan kemitraan antar komunitas kota, sehingga idealnya dilaksanakan secara sinergi antar *Stakeholders* kota secara lengkap, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pelaksanaan kerjasama *Sister City* di Kota Bandung mulai muncul pada tahun 1960, yaitu kerjasama *Sister City* yang terjalin dengan Kota Braunschweig, Jerman. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama tertua di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Kota Bandung juga menjalin kerjasama *Sister City* dengan beberapa kota lain. Adapun kota-kota yang telah menjalin kerjasama dengan *Sister City* sampai saat ini adalah :

1. Kota Braunschweig, Jerman
2. Kota Forth Worth – Texas, Amerika Serikat
3. Kota Suwon, Korea Selatan
4. Kota Yingkou, Republik Rakyat China
5. Kota Liuzhou, Republik Rakyat China
6. Kota Shenzhen, Republik Rakyat China
7. Kota Petaling Jaya, Malaysia
8. Kota Hamamatsu, Jepang

²Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

³Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar

Dalam menjalin kemitraannya pada skema *Sister City*, Pemerintah Kota Bandung membangun suatu kerjasama pada bidang yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga bermanfaat bagi pembangunan daerah seperti pada dalam bidang :

1. Ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan pariwisata
2. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan administrasi
3. Pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga.

Pada Juli 2008 Bandung mendapat kunjungan resmi dari Delegasi Kota Hamamatsu di Kota Bandung. Delegasi Kota Hamamatsu, yang dipimpin oleh Bapak Tanaka Hiroji, berjumlah 14 orang terdiri dari perwakilan Pemerintah Kota Hamamatsu, Kadin Kota Hamamatsu, Perwakilan Konsultan, Direktur Perusahaan dan para pengusaha.

Seluruh delegasi merupakan anggota Lembaga Persahabatan Indonesia Hamamatsu yang berkedudukan di Jepang.⁴ Pada acara tersebut dibicarakan peluang-peluang kerjasama antara kedua kota nantinya. Namun kerjasama *Sister City* tersebut baru bisa terealisasi pada Desember 2014, butuh waktu enam tahun untuk meresmikan kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Hamamatsu.⁵

Dengan merujuk pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut : *Mengapa Kota Bandung melakukan Kerjasama Sister City dengan Kota Hamamatsu ?*

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

- I. Membuka wawasan mengenai suatu kerjasama *Sister City* antara kota Bandung dengan kota Hamamatsu.
- II. Mengetahui tentang bagaimana peluang-peluang yang akan diciptakan oleh kedua kota tersebut dalam kerjasama *Sister City*, serta meneliti bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh kedua kota tersebut dalam kerjasamanya.

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

- I. Diharapkan bagi pemerintah kota Bandung dan pihak kota Hamamatsu sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk dapat melihat peluang dan tantangan *Sister City* sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan, pertukaran informasi, kerjasama dan *memorandum of understanding* diantara kedua belah pihak.

⁴www.Bandung.go.id diakses pada 29 Februari 2016, pkl 21.00 WIB

⁵www.Galamedianews.com diakses pada 29 Februari 2016, pkl 21.00 WIB

- II. Diharapkan Penelitian ini diyakini dapat menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut terhadap kajian *Sister City* sebagai salah satu bentuk diplomasi yang memiliki peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama internasional dengan kota-kota lain diberbagai negara di dunia.

Untuk dapat mendukung penelitian ini, terdapat beberapa Kajian Pustaka yang mampu menjadi pendorong dan dapat berkontribusi dalam penelitian ini, serta menunjukkan tingkat keaslian penelitian ini, Kajian Pusataka tersebut adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Faridha Yanuarita dalam Media Jurnal Analisis Hubungan Internasional tentang Kerjasama *Sister City* Surabaya dengan Varna. Penelitian ini berusaha menjelaskan faktor yang menjadi latar belakang kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan mitra keenam *sister city* yaitu Pemerintah Kota Varna. Kerjasama *sister city* biasanya didasari oleh adanya sejumlah persamaan masing masing kota. Begitu juga dengan Kota Surabaya dan Kota Varna yang memiliki beberapa kemiripan.

Kota Surabaya dan kota Varna sama-sama menjadi kota dengan pelabuhan kedua terbesar di negaranya masing-masing juga merupakan tempat markas Angkatan Laut dan Akademi Militer Angkatan Laut, kemudian sama sama memiliki fakultas kedokteran yang maju.

Yang menarik dari penelitian ini adalah pertama kalinya bagi Surabaya melakukan kerjasama *sister city* dengan salah satu kota di Eropa Timur dan bagi Varna dengansalah satu kota di Asia, secara geografis kedua kota ini posisinya sangat berjauhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Stivani Ismawira Sinambela pada tahun 2014 mahasiswa S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Kebijakan pemerintah daerah dalam penataan kerjasama internasional” (Studi Kasus: Kerjasama *Sister City* Pemerintah Kota Medan dengan Penang) kajian ini lebih memfokuskan pada pembahasan tentang *Sister Cities*, Kebijakan Pemerintah dalam Kerjasama Internasional, khususnya kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Medan dan Penang.

Mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kerjasama *sister city* ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Globalisasi memberikan efek yang nyata dalam hubungan internasional terutama negara sebagai aktor utama telah berubah tidak hanya negara yang satu-satunya menjadi aktor utama tetapi juga aktor lain juga ikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Caroline Purnawan dan Ifa Safira Mustikadara, yang berjudul Kampanye *Sister city* Bandung- Braunschweig untuk membuka peluang kerjasama kreatif kedua kota.

Menjelaskan bahwa kampanye tentang *sister city* tersebut dapat membuka sebuah peluang kerjasama kreatif antara kota Bandung dan Braunschweig, kampanye ini ini difokuskan kepada anak muda kreatif Bandung yang proaktif dan berjiwa kompetitif agar mereka dapat menjadi *agent of change* yang dapat menghembuskan angin perubahan bagi hubungan *Sister City* Bandung-Braunschweig.

Secara demografis, target dapat dikerucutkan menjadi pria dan wanita berumur 18-25 tahun yang berdomisili di Bandung dengan SES (Status Ekonomi Sosial) A-B serta pendidikan S1. Secara psikografis, target merupakan pribadi yang idealis-realis, visioner, dan ambisius karena mereka punya mimpi dan mereka berusaha keras mewujudkan mimpinya itu. Tidak takut bersaing secara kreatif dengan bangsa lain (kompetitif), cenderung ingin membuka *link* seluas-luasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoero dara fazra yang berjudul KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAANKERJASAMA INTERNASIONAL (Studi Kasus: Proses Kerja sama *Sister City* Kabupaten Bogor dengan Nanning (RRT) pada tahun 2008-2015), menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bogor bekerjasama dengan Nanning melalui kerjasama *sister city*.

Dalam bidang sistem perpolitikan, RRT menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap warganya. Karakteristik perpolitikan di RRT yang sangat sentralistik pada pemerintahan. Yang menyebabkan satu- satunya institusi yang memiliki kekuasaan adalah pemerintah.

Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan fenomena yang ada, lantas bagaimana proses kerjasama *sister city* antara Kabupaten Bogor dengan Nanning yang memiliki sistem pemerintahan dan kebijakan yang berbeda. Kabupaten Bogor yang tidak memiliki daerah keistimewaan seperti Yogyakarta dll. Begitu pula dengan Nanning yang negaranya menganut sistem sentralistik.

Namun pada kenyataannya, fenomena baru kerjasama internasional dengan konsep *sister city*, hampir menghilangkan kontrol dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa mengadakan perjanjian dengan pemerintah daerah lain antar negara. Pemerintah daerah menjadi aktor baru dalam kerjasama internasional. Pemerintah daerah dapat mengadakan dan menjalin kerjasama

internasional tanpa adanya kontrol dari pemerintah pusat.

Kerjasama *sister city* yang berawal dari tahun 2006-2008 hingga kerjasama tersebut di perpanjang kembali dengan penandatanganan LOL yang di sepakati di tahun 2015. Munculnya peluang dan tantangan dengan melihat poin-poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut, memunculkan bagaimana proses kerjasama tersebut bisa dilakukan dari tahun 2006 hingga mendapatkan persetujuan pada tahun 2008.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, setiap pemerintah daerah harus melalui lima tahap tersebut untuk mengadakan kerjasama *Sister City*.

Kelima tahapan tersebut merupakan prosedur resmi yang menjadi proses kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, proses yang sangat memakan waktu sering menjadi masalah bagi pemerintah daerah yang akan melaksanakan kerjasama *Sister City*.

Masalah prosedur menjadi hambatan bagi terlaksananya kerjasama tersebut. Hal ini juga menjadi masalah bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nanning. Masalah birokrasi dan prosedural menjadi masalah bagi terlaksananya kerjasama *Sister City*.

Dalam rangka menjalankan kerjasama *Sister City* tersebut, tahapan-tahapan tersebut juga dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan dalam empat tahapan besar guna memotong masalah procedural tersebut. Tahap pertama adalah peninjauan atau pengenalan, Tahap yang kedua, yaitu pembahasan draft MoU, Tahap yang ketiga, yaitu penandatanganan MoU, Tahap keempat, pelaksanaan kegiatan.

Meskipun hanya melalui empat tahapan yang harus dilaksanakan, namun keempat tersebut sudah mencakup dari kelima tahapan yang harus di laksanakan oleh pemerintah daerah. Namun karena adanya otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pemerintahannya.

Sehingga, dalam melaksanakan kerjasama *Sister City*, Pemerintah Kabupaten Bogor bisa mengambil kebijakan dalam Proses Kerjasama *Sister City* tidak melalui lima tahapan yang ditentukan. Namun hanya melakukan empat tahapan yang bisa mencakup lima tahapan yang wajib dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Chung, Mona and Mascitelli, Bruno 2008, yang berjudul "*The role of sister city relationships in the enhancement of trade Latrobe City (Australia) and Taizhou (China)*". Dalam tulisan tersebut menjelaskan bagaimana proses *sister*

city terjadi karena adanya keinginan dua wilayah untuk tetap bisa bersaing dalam dunia global.

Beberapa perubahan politik global menjadikan *sister city* salah satu tujuan dalam upaya memenangkan persaingan di dunia internasional. Atau dengan kata lain *sister city* terjadi karena Adanya faktor eksternal dari Dunia Internasional. Adapun beberapa faktor tersebut yaitu :

- a) Fase Asosiatif
- b) Fase Reciproactive
- c) Fase Pertukaran Komersial

Terakhir adalah Penelitian yang dilakukan oleh Kyle Campbell dan Malmo Hogskola yang berjudul "*Sister Cities and Diaspora, From Diaspora to Potential Sister City Partnership*" Menjelaskan bahwa proses kerjasama *sister city* adalah karena adanya proses perpindahan penduduk. Menetapnya suatu komunitas masyarakat di suatu negara melahirkan rasa untuk tetap memajukan daerah asalnya. Hal ini yang mendorong adanya kerjasama *sister city* antara Governador Valadares, Brasil dan Framingham, Amerika Serikat.

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia, para diplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas "*sub-state* ", atau pemerintah regional/ pemda, dalam rangka kepentingan mereka yang secara spesifik.⁶

Dalam buku yang di tulis oleh Takdir Ali Mukti dengan judul buku "*Paradiplomacy kerjasama luar negeri oleh Pemda di Indonesia*" buku ini membahas tentang : Hubungan Transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca Regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan Transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utamakedaulatan "***suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan share***" kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya.⁷

Dilihat dari penelitian yang menjadi Tinjauan Pustaka di atas, penulis dapat memposisikan bahwa penelitian atau tulisan Kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda, dapat dilihat dari Kota Bandung yang tidak terlalu melihat kesamaan kulture atau budaya atau kesamaan lainnya akan tetapi

⁶Wolf, Stefan, 2009, "*paradiplomacy: scope, opportunities and challenges*" hal 1-2 dan 13, university of Nottingham.

⁷Takdir Ali Mukti, 2013, "*Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*", Yogyakarta

lebih dilihat dari segi peluang dan *benefit* yang akan Kota Bandung dapatkan dari kerjasama Sister City dengan Kota Hamamatsu.

Peneliti menggunakan beberapa Kerangka Teori atau Konsep guna memperkuat argumen dalam penelitiannya antara lain Konsep *Sister City* konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antarpenduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi.

Pada dasarnya tujuan utama kerjasama antara kota dari negara yang berbeda adalah menjembatani hubungan antara masyarakat kota disatu negaradengan masyarakat kota di negara lain sebagai *people to people diplomacy*.

Selain itu kerjasama ini juga dapat dijadikan trobosan dalam mencari pasar danpromosi investasi disamping untuk mengoptimalkan potensi yang ada.Kerjasama *sister city* atau kota kembar disini berarti hubungan kemitraan antarsuatu kota disuatu negara dengan kota dinegara lainnya.⁸

Konsep Otonomi Daerah Berlakunya otonomi daerah maka memberi kesempatan bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk menggalang kerja sama luar negeri secara langsung dalam rangka mengembangkan daerahnya masing-masing dan memperoleh manfaat dari program kerja sama tersebut, kecuali dalam bidang-bidang yang menyangkut kewenangan yang masih menjad itanggung jawab pemerintah pusat yaitu: Urusan luar negeri yang mencakup pertahanan keamanan, fiskal,moneter, peradilan serta urusan agama.⁹

Otonomi Daerah merupakan konsep yang “baru” diterapkan di Indonesia, dan perkembangannya perlu dicermati oleh seluruh warga negara Indonesia.Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan, baik di kalangan ilmuwan bidang ilmu politik,administrasi negara, ilmu pemerintahan, praktisi,maupun para pengamat.¹⁰

Konsep Paradiplomacy, Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia, para diplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “ *sub-state* „ atau pemerintah regional/ pemda, dalam rangka kepentingan mereka yang secara spesifik.

Di era globalisasi Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang terus bertambah maju,

⁸Mimbar Hukum,Agustinus supriyanto,91

⁹Obasatar Sinaga, Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Implementasi Kerja sama Internasional.Juli 2010

¹⁰ibid

dengan munculnya isu-isu kompleks dalam hubungan internasional yang melewati tapal batas-batas negara dan arus globalisasi yang semakin tidak mengenal ruang dan waktu.

Untuk melahirkan berbagai macam bentuk dan cara-cara diplomasi yang baru.Fenomena tersebut perlahan tapi pasti mulai menggantikan cara-cara diplomasi tradisional yang cenderung terlihat sangat kaku yang hanya dijalankan oleh sekelompok orang terlatih yang ditunjuk resmi oleh pemerintah suatu negara.

Hal ini menjadi cikal bakal lahirnya diplomasi yang modern yang sangat fleksibel dan memunculkan berbagai macam aktor yang berperan didalamnya.Melihat kondisi politik internasional dan pola diplomasi yang berubah, pemerintah-pemerintah diseluruh dunia dituntut untuk merumuskan dan merancang rancangan kebijakan luar negeri yang disesuaikan dengan kondisi dunia internasional yang sedang mengalami globalisasi demi memelihara eksistensi dan peranannya dalam dunia internasional.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Eksplanatif. Penelitian Eksplanatif adalah penelitian yang berguna dalam menjelaskan sebuah fenomena dengan dibantu oleh Kerangka Teori atau Konsep .

B. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Untuk memfokuskan Penelitian ini maka dibutuhkan jangkauan penelitian , Jangkauan Penelitian ini di mulai dari tahun 2016 dan berlokasi di Kota Bandung.

C. Metode Pengumpulan Data

Beberapa Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah Telaah Pustaka seperti pengumpulan literatur seperti buku-buku, dokumen,jurnal yang menunjang penelitian ini dan melalui situs-situs inter net yang memuat data tentang penelitian ini, dan yang terakhir dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber terkait.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Kota Bandung Melakukan Kerjasama Sister City dengan Kota Hamamatsu

Kota Bandung memiliki alasan yang mendasar dan mengakar dalam perjalanannya melakukan kerjasama dengan Kota Hamamatsu, alasan ini yang didasari dan diyakini mengapa Kota Bandung ingin melakukan Kerjasama sister city dengan Hamamatsu berawal ketika jaman perang pasifik ketika tentara Jepang asal Kota Hamamatsu ditolong oleh warga Bandung, hal kecil namun cukup berpengaruh dalam sejarah kerjasama antara kedua Kota tersebut.

Melihat dari sisi Historis yang begitu lama dan penuh dengan kenangan, hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa Kota Bandung dan Kota Hamamatsu memutuskan bekerjasama dalam hal yg lebih luas lagi dalam ranah *sister city* yang dimana diharapkan mampu memperluas kerjasamanya dalam berbagai bidang atau sektor.

Bidang Lingkungan Hidup dan Kota Kreatif menjadi fokus utama pada saat itu, selain alasan mengenai hubungan lama yang terjalin antara kedua kota, Kota Bandung juga memiliki beberapa alasan utama yang menjadi pertimbangan dalam memperluas kerjasama antara kedua kota tersebut.

Peluang menjadi alasan berikutnya, Peluang disini diartikan sebagai opportunity atau kesempatan yang bisa diambil oleh Kota Bandung dalam Kerjasama *Sister City* dengan Kota Hamamatsu, banyak peluang yang telah diamati oleh Kota Bandung dalam Kerjasama *Sister City*, dan tidak dalam waktu lama akan terealisasikan.

Setiap ada peluang pasti ada tantangan, tantangan merupakan salah satu hal yang harus Kota Bandung hadapi dalam proses sebuah kerjasama *Sister City*, agar Kota Bandung optimis dalam manatap masa depan kerjasama sister city dengan Kota Hamamatsu.

Dari tantangan ini Kota Bandung berevolusi dalam menghadapi segala halangan, tantangan maupun problem yang datang dan mempengaruhi jalannya Kerjasama *Sister City* dengan Kota Hamamatsu.

Peluang dan tantangan merupakan indikator yang mempengaruhi mengapa Kota Bandung melakukan Kerjasama *Sister City*, dan kedua indikator ini secara otomatis juga sangat mempengaruhi efektifitas kerjasama anantara kedua kota Bandung dengan Kota Hamamatsu.

B. Peluang dan Tantangan Sebagai Alasan Kerjasama Sister City Kota Bandung –Kota Hamamatsu

Alasan awal Kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu adalah hubungan baik yang telah terjalin lama pada saat masa perang pasifik berlangsung, dari hasil hasil wawancara dengan Ibu Sindi Rahmi.S.S selaku ketua bagian Kota Hamamatsu dalam Sub Bagian Kerjasama Internasional Kota Bandung menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu

setelah Kota Bandung melakukan kerjasama sister City dengan Kota Hamamatsu, Kota Bandung memiliki alasan yang utama mengapa Kota Bandung ingin bekerjasama dan memperluas bidang kerjasama dalam ranah *Sister City* dengan Kota Hamamatsu dilihat dari indikator yang menjadi *main reason* nya yaitu Peluang, serta Tantangan yang dapat membuat Kota Bandung lebih baik lagi dalam itu bekerjasama dengan Kota Hamamatsu maupun dengan Kota- kota lainnya.¹¹

I. Peluang Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu

Kota Bandung melihat adanya peluang besar dalam Kerjasama *Sister City* dengan Kota Hamamatsu, yaitu peluang Kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu yang masih dalam tingkat *Letter of Intent* (LoI) mampu menjadi tingkat *Memorandum of Understanding* (MoU). *Letter of Intent* adalah sebuah surat resmi yang secara hukum tidak mengikat para pihak tersebut didalamnya, untuk menyampaikan ketertarikan, niat atau minat dan maksud tujuan yang jelas. Dalam hal *Sister City* yang berkategori LoI menandakan bahwa Hubungan Kerjasama kota tersebut dengan Kota Bandung sudah dilakukan proses peninjakan dan dilanjutkan pada tahap penandatanganan *Letter of Intent*.

Dengan ditandatanganinya LoI menunjukkan bahwa keinginan untuk bekerjasama mendapat sambutan positif dari masing-masing pihak.¹² Untuk selanjutnya dilakukan proses-proses untuk meningkatkan Hubungan Kerjasama *Sister City* tersebut kedalam tingkat MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai pintu gerbang dasar hukum pelaksanaan Kerjasama *Sister City* yang mengikat kedua belah pihak. Dengan tujuan agar Kerjasama *Sister City* yang telah terikat secara Hukum Internasional ini dapat lebih terasa manfaatnya baik bagi Pemerintah Kota kedua belah pihak ataupun masyarakat kedua kota.¹³

Dengan menimbang *Letter of Intent* yang telah disepakati maka Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung menyetujui Kerjasama *Sister City* dalam bidang yang sudah disepakati bersama. Sehingga kedua kota hanya tinggal melakukan *action plan* yang harus direalisasikan.

Action Plan yang telah direalisasikan antara lain:

1. Pelatihan UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas produk kreatif Kota Bandung. Dalam pelatihannya Kota Hamamatsu memberika kepelatihan bagaimana cara membuat sebuah makanan dalam produk instant, kita tau bahwa Jepang terkenal akan Mie Ramennya, di Jepang Ramen dapat dijumpai dalam bentuk Cup. Maka dalam kepelatihannya Masyarakat Kreatif Bandung

¹¹Hasil Wawancara dengan Sindi Rahmi, Bagian Kerjasama Internasional Bandung khusus Kota Hamamatsu

¹²Sub Bagian Kerjasama Internasional Kota Bandung, LoI

¹³Sub Bagian Kerjasama Internasional Kota Bandung, LoI

diberikan cara dalam membuat makanan instant dalam bentuk cup, seperti Bakso Cuanki dan Seblak instant yang sudah dapat dijumpai dalam bentuk cup.

2. *Sharing Best Practices* Manajemen persampahan, air dan limbah. Kota Hamamatsu memberikan penyuluhan serta kepelatihan cara memajemen sampah yang ada di Kota Bandung, mengingat dari tahun ke tahun sampah selalu menjadi indikasi masalah yang sangat mengawatirkan di Kota Bandung, image Kota Bandung sebagai Kota Paris Van Java sedikit hilang akibat banyaknya sampah yang menggunung. Kemudian dengan masalah air dan limbah, bagaimana Perwakilan Kota Hamamatsu memberikan kepelatihan cara mendaur ulang limbah sebagai barang recycle agar dapat digunakan lagi serta dapat dijual dan menjadi mutu kreatif masyarakat Kota Bandung.
3. Optimalisasi Peran KADIN dalam memfasilitasi Kerjasama antar pelaku usaha kedua kota. Peran KADIN sangat penting mengingat sebagai fasilitator antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu, dimana pelaku usaha dari Hamamatsu ingin berinvestasi di Kota Bandung harus melalui KADIN. Disinilah Kebijakan serta Birokrasi KADIN harus benar-benar terstruktur agar Kerjasama dalam bidang investasi dapat lancar dan menguntungkan kedua belah pihak.
4. Pertukaran Pemuda dan Akademisi untuk percepatan perwujudan masyarakat unggul dan mandiri. Program ini dilakukan oleh Kota Bandung dalam hal pendidikan, SMA 5 Bandung dipilih sebagai wakil pelajar yang akan diberangkatkan dalam program pertukaran pemuda di Kota Hamamatsu, dan wakil dari Mahasiswa dipilihlah beberapa Mahasiswa dari Universitas Padjadjaran Bandung dalam pertukaran Akademisi di Kota Hamamatsu guna memunculkan masyarakat yang unggul dan mandiri bagi Kota Bandung sendiri.
5. Misi Promosi Tourism Kota Bandung dari Dinas Budaya dan Pariwisata. Pada tahun 2015 Perwakilan Kota Hamamatsu berkunjung ke Kota Bandung guna membahas Bidang Kerjasama Kebudayaan, mengenai tourism Kota Bandung. Dan direspon baik oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dan akan ditindaklanjuti dengan kunjungan balasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ke Kota Hamamatsu pada tahun 2016 ini dengan membahas Misi Promosi Tourism.

Letter of Intent maupun *Memorandum of Understanding* merupakan salah satu dari Konsep *Sister City* yang digunakan oleh Kota Bandung dalam melakukan Kerjasama *Sister City* dengan Kota Hamamatsu, Konsep *Sister City* bertujuan:

- a. Memperkuat kerjasama antar kota-kota yang ada didunia.

- b. Menyediakan kesempatan bagi para pejabat kota dan penduduk untuk merasakan dan menjelajahi kebudayaan lain dalam kerjasama masyarakat jangka panjang.

- c. Menciptakan keadaan yang membuat perkembangan ekonomi dan masyarakat dapat diimplementasikan dan diperkuat.

- d. Merangsang lingkungan yang masyarakatnya berusaha belajar, bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah bersama secara kreatif dalam timbal balik budaya, pendidikan, perkotaan, bisnis, profesi, dan pertukaran secara teknik dan proyek-proyek.

- e. Mengkolaborasi organisasi-organisasi di dunia dan yang berbagi tujuannya.

Dalam Konsep ini dapat terlihat poin a, b dan d merupakan tujuan yang diambil dalam kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Hamamatsu. Kerjasama *Sister City* ini dikonsep secara unik dan memiliki dua jalan yaitu memberi dan menerima segala hal yang didapat dari kedua belah pihak.

Program ini mengarah pada hubungan yang terencana dan berkelanjutan antara Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu. Kerjasama ini memacu interaksi diantara orang-orang yang tinggal di Kota Bandung maupun sebaliknya orang-orang atau masyarakat Kota Hamamatsu juga ikut berinteraksi didalamnya.

Peluang realisasi MoU Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu sebenarnya sudah dicanangkan sejak setengah tahun lalu dan akan direalisasikan pada tahun 2016 pada saat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berkunjung ke Hamamatsu Jepang dalam rangka *Local Tourism*.

Di Hamamatsu nanti akan dibahas mengenai Kerjasama *Local Tourism* yang dimana Kota Bandung akan mempromosikan travel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pariwisata dan kearifan lokal lainnya.

Disamping itu disisipkanlah penandatanganan MoU yang dilakukan kedua Kota di Hamamatsu Jepang, jika Lol ditandatangani di Bandung maka MoU akan ditandatangani di Hamamatsu Jepang, ini merupakan salah satu simbol bahwa kedua kota saling menghormati dan menghargai.

Local Tourism, merupakan fokus utama dalam kunjungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ke Hamamatsu Jepang, sebab dengan mengandalkan segala potensi-potensi pariwisata yang ada di Kota Bandung seperti Gunung Tangkuban Perahu serta Kawah Putih dan banyak tempat wisata lainnya, Kota Bandung juga akan mengenalkan bagaimana kearifan lokal yang ada di Kota Bandung melalui masyarakat kreatifnya yang juga merupakan *action plan* yang dilakukan oleh Kota Bandung dan Kota

Hamamatsu, serta tata kota yang kini menjadi lebih tertata dan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara yang nantinya ingin berkunjung ke Kota Bandung.

Peluang inilah yang benar-benar dimanfaatkan oleh Kota Bandung dalam penyusunan perjanjian MoU yang akan ditandatangani serta disahkan di Kota Hamamatsu Jepang, serta meyisipkan pengembangan kerjasama di bidang Pendidikan dan Kesehatan.

2. Tantangan Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota Hamamatsu

Banyak Peluang yang bisa di ambil dari kerjasama *sister city* dengan Kota Hamamatsu .Salah satu diantaranya adalah Peningkatan Lol menjadi MoU, serta pengembangan kerjasama di Bidang Pariwisata yaitu Local Toursm, Pendidikan, dan kesehatan.Ditengah berbagai manfaat dan peluang-peluang yang dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung, seyogyanya jangan sampai membuat lengah Pemerintah Kota Bandung terhadap tantangan-tantangan yang akan muncul nantinya, sebab akan merugikan pihak Pemerintah Kota Bandung itu sendiri.

Tantangan awal yang menjadi hambatan adalah dari segi format MoU di Indonesia masing kurang detail, menurut hasil wawancara dengan Ibu Sindi Rahmi. S.S, format MoU di Indonesia haruslah detail tidak sepotong-sepotong karena nantinya akan menimbulkan kesalahpahaman anantara kedua belah pihak.¹⁴

Tantangan selanjutnya adalah masalah Protokoler, dalam hal ini mekanisme atau prosedur masih sangat lambat dan terkesan merepotkan tidak cepat dan mudah, hal ini yang masih harus menjadi pekerjaan rumah dan menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Bandung, karena ini timbul dari sumber daya manusianya itu sendiri yang menyebabkan proses protokoler menjadi seperti itu. Jika semua proses menjadi cepat dan mudah justru itu akan sangat menguntungkan mekanisme atau prosedur Kerjasama *Sister City* di Kota Bandung.

Tantangan yang berikutnya adalah Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Kota Bandung. Kita tau Bandung dipenuhi oleh masyarakat yang kreatif, *action plain* kerjasama *Sister City* ini pun mengusung Kota Kreatif, tapi kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia juga merupakan tantangan tersendiri bagi Kota Bandung, dimana kuantitas serta kualitas SDM Masyarakat Bandung apakah mampu meningkat dan

mampu bersaing dengan SDM Kota Hamamatsu seiring era Globalisasi saat ini.

Tantangan yang terakhir adalah mengenai kurangnya sosialisasi tentang *Sister City* Kota Bandung bagi masyarakat awam. Sangat mengherankan memang melihat bahwa Kota Bandung merupakan Kota dengan kerjasama *Sister City* paling tua akan tetapi banyak masyarakatnya yang tidak tau apa itu *Sister City*. Bahkan sampai pemerintah Kota Bandung membangun Monumen Kota Kembar di simpang jalan dekat Balai Kota pun Masyarakat Kota Bandung masih banyak yang tidak tau, hal inilah yang ditakutkan oleh Pemerintah Kota Bandung disaat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berkunjung ke Hamamatsu dalam misi Promosi Pariwisata akan tetapi Masyarakat Kota Bandung sendiri masih belum mengetahui apa itu *Sister City*.

Diharapkan hal ini menjadi evaluasi agar Pemerintah Kota Bandung lebih gencar dalam mensosialisasikan Program Kerjasama *Sister City* di Kota Bandung karena ini sangat lah penting jika Masyarakat serta Pemerintah Kota Bandung bisa saling bersinergi dalam mempromosikan Potensi pariwisatanya dalam Bidang Kerjasama *Sister City* dengan Kota Hamamatsu.

Tantangan merupakan masalah atau halangan yang harus dihadapi dan diselesaikan dicari jalan keluarnya agar mampu menjadi lebih baik, begitu juga Tantangan yang dihadapi Kota Bandung dalam Kerjasama *Sister City* dengan Kota Hamamatsu yang memiliki berbagai tantangan akan tetapi tantangan juga salah satu proses evaluasi bagi Kota Bandung agar kedepannya Kota Bandung mampu bekerjasama dengan lebih baik lagi sehingga citra Kota Bandung sebagai Kota *Sister City* dipandang baik oleh Kota Hamamatsu maupun Kota-kota di belahan negara lainnya.

IV. KESIMPULAN

Kota Bandung memiliki alasan yang mendasar dan mengakar dalam perjalanannya melakukan kerjasama dengan Kota Hamamatsu, alasan ini yang didasari dan diyakini mengapa Kota Bandung ingin melakukan Kerjasama *sister city* dengan Hamamatsu berawal ketika jaman perang pasifik ketika tentara Jepang asal Kota Hamamatsu ditolong oleh warga Bandung, hal kecil namun cukup berpengaruh dalam sejarah kerjasama antara kedua Kota tersebut.

Melihat dari sisi Historis yang begitu lama dan penuh dengan kenangan, hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa Kota Bandung dan Kota Hamamatsu memutuskan bekerjasama dalam hal yg lebih luas lagi dalam ranah *sister city* yang dimana diharapakan mampu

¹⁴Hasil Wawancara dengan Sindi Rahmi.S.S, Ketua Bagian Kota Hamamatsu, Sub Bagian Kerjasama Internasional Kota Bandung

memperluas kerjasamanya dalam berbagai bidang atau sektor.

Peluang menjadi alasan berikutnya, Peluang disini diartikan sebagai opportunity atau kesempatan yang bisa diambil oleh Kota Bandung dalam Kerjasama Sister City dengan Kota Hamamatsu.

Setiap ada peluang pasti ada tantangan, tantangan merupakan salah satu hal yang harus Kota Bandung hadapi dalam proses sebuah kerjasama *Sister City*, agar Kota Bandung optimis dalam manatap masa depan kerjasama sister city dengan Kota Hamamatsu.

Daftar Pustaka

- [1.] Aart, S. J. (2000). *Globalization : A Critical Introduction* . New York: Palgrave.
- [2.] David. (2008). *Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Wtering Down?* Belgia: University of Antwerp and Flemish Centre for International Policy.
- [3.] International, S. C. (2010). *What are Sister Cities ?* Washington DC.
- [4.] Juanda. (2008). *Hukum Pemerintahan*.
- [5.] Mas'oed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- [6.] Regions, C. o. (2007). *Twining For Tomorrow's World*. Paris & Brussels: Pratical Handbook.
- [7.] Sinaga, O. (2010). *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Implementasi Kerja sama Internasional*. Jakarta.
- [8.] Supriyanto, A. (1991). *Mimbar Hukum*.

[9.] Wolf, S. (2009). *Paradiplomacy, Scope, Opportunities and Challenges*. Nottingham: Crikemas.

[10.] Takdir Ali Mukti, 2013, "*Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*", Yogyakarta

Referensi dari Media Cetak dan Online

- [1.] Profil Kabupaten/Kota Bandung, Jawa Barat
- [2.] List of twin towns and sister cities in Indonesia [http://
/List_of_twin_towns_and_sister_cities_in_Indonesia]
- [3.] Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan [4.] Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Provinsi (Sister Province) dalam dan luar negeri.
- [5.] Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- [6.] Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar
- [7.] Pemerintahan Kota Bandung, 2011:15
- [8.] www.Bandung.go.id
- [9.] www.Galamedianews.com
- [10.] www.sistercities.org.nz/Editable/home/index.shtml